

SIARAN PERS

Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026

Nomor: 002/HMS.ST/SP/IIV/2026

Palu, Bawaslu Sulteng – Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan secara langsung terhadap Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/7/2026). Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat.

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Nasrun, bersama Anggota Bawaslu Sulawesi Tengah Dewi Tisnawaty, didampingi jajaran sekretariat, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pengawasan, serta staf teknis pengawasan, hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi. Kehadiran Bawaslu memastikan seluruh tahapan rapat pleno berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan sesuai prosedur

Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Darmiati, dan dihadiri jajaran anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta perwakilan partai politik. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akurasi pemutakhiran data pemilih.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah pemilih berkelanjutan Semester I Tahun 2026 tercatat sebanyak 2.369.497 pemilih, terdiri atas 1.208.006 pemilih laki-laki dan 1.161.491 pemilih perempuan yang tersebar di 177 kecamatan dan 2.017 desa/kelurahan pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memberikan sejumlah masukan kepada KPU, di antaranya agar penyajian data pemilih baru, pemilih pindah masuk, dan perubahan data lainnya ditampilkan secara lebih rinci sehingga memudahkan proses pengawasan maupun evaluasi terhadap perkembangan data pemilih. Bawaslu juga mendorong agar koordinasi antara KPU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus diperkuat guna memastikan setiap perubahan data kependudukan dapat segera ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah turut menyampaikan data pemilih penyandang disabilitas kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak pilih seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan. Masukan tersebut mendapat tindak lanjut dari KPU yang akan memasukkan pembaruan data dimaksud pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Semester III Tahun 2026.

Hasil pengawasan juga menunjukkan bahwa proses rapat pleno berlangsung sesuai tahapan, mulai dari pembacaan rekapitulasi, penandatanganan berita acara, hingga penyerahan dokumen kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, instansi pemerintah, aparat keamanan, serta perwakilan partai politik sebagai bentuk keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Rapat Pleno juga dihadiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Sulawesi Tengah, Komando Daerah Militer (Kodam) XXIII/Palakawira, Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sulawesi Tengah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan partai politik.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap setiap proses pemutakhiran data pemilih sebagai langkah preventif untuk menjaga akurasi daftar pemilih sekaligus memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat memperoleh hak konstitusionalnya pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Palu, 07 Juli 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

ttd

Nasrun

HumasBawasluSulteng